FILSAFAT PENDIDIKAN DALAM MENANGGAPI PERUNDUNGAN SEBAGAI BENTUK PENINDASAN

Nur Khairah Sukma¹, Ismail²
herasukma212@gmail.com¹, ismail6131@unm.ac.id²
Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Artikel ini mengulas peran filsafat pendidikan dalam menanggapi perundungan sebagai bentuk penindasan di lingkungan pendidikan. Dengan mengintegrasikan konsep filsafat, artikel ini membahas berbagai perspektif dan teori filsafat yang relevan untuk pemahaman mendalam tentang fenomena perundungan. Fokus utama adalah menganalisis bagaimana pandangan etika, keadilan, dan kekuasaan dalam filsafat pendidikan dapat memberikan wawasan yang berharga terhadap perundungan sebagai bentuk penindasan yang melibatkan interaksi sosial di dalam institusi pendidikan. Dengan menggabungkan kerangka pemikiran filsafat pendidikan dengan isu sosial yang relevan, artikel ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang peran pendidikan dalam merespons dan mengatasi bentuk penindasan seperti perundungan. Kesimpulan dari artikel ini menggarisbawahi urgensi pemahaman filosofis terhadap isu-isu sosial kontemporer dan bagaimana filsafat pendidikan dapat menjadi pendorong perubahan yang positif dalam masyarakat.

Kata kunci: Filsafat Pendidikan, Perundungan, Penindasan.

PENDAHULUAN

Pendidikan, sebagai sarana pembentukan karakter dan penyampai nilai-nilai masyarakat, memiliki peran kritis dalam menanggapi fenomena perundungan di lingkungan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengulas peran filosofis dalam menanggapi perundungan sebagai bentuk penindasan di dalam institusi pendidikan. Dengan menggabungkan konsep-konsep filsafat, artikel ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan teori yang merangkum pemahaman mendalam terhadap fenomena kompleks perundungan. Saat ini, perundungan merupakan istilah yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti dan membuat onar kepada seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Pelaku perundungan sering disebut dengan istilah bully seorang perundungan tidak mengenal gender maupun usia seperti anak kecil, dewasa atau orang yang lebih tua dari dia bahkan, perundungan sudah sering terjadi di sekolah dan dilakukan oleh para remaja. (Zakiah, E.Z., dkk. 2017).

Analisis pandangan etika, keadilan, dan kekuasaan dalam kerangka filsafat pendidikan merupakan langkah kritis dalam pemahaman terhadap perundungan di lingkungan pendidikan. Landasan filosofis memberikan alat untuk merinci dan mengartikan dinamika kompleks yang melibatkan interaksi sosial di dalam konteks pendidikan. Dalam hal ini, etika, keadilan, dan kekuasaan berfungsi sebagai pilar kunci yang membentuk dan memahami. Maka dari itu sangat dibutuhkan sekali pendidikan moral sejak dini, karena sesuai dengan pendapat Emile Durkheim, bahwa apabila tahap kanak-kanak pada masa sekolahnya itu berlalu, belum diletakkan dasar-dasar moralitas, maka dasar-dasar moralitas itu tidak akan tertanam dalam diri si anak (Durkheim, dalam Lukas Ginting 1990 :13). Bagi Durkheim, sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dan sangat khusus; untuk menciptakan makhluk baru, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Durkheim mencoba mengerti kebutuhan anak khususnya dalam hal pendidikan moral, bagaimana metode yang digunakan kepada anak, sehingga anak didik mampu memahami serta menerima pendidikan moral ini. Durkheim sebagai pemikir sosiolog dan filsuf, perhatiannya sudah penuh tercurahkan pada moralitas (Sinulingga, S.P. 2016).

Menghadapi Pergeseran dari pendekatan klasik ke pendekatan kontemporer dalam analisis nilai-nilai moral membawa implikasi signifikan dalam pandangan terhadap etika. Pendekatan kontemporer menekankan dinamika dan fleksibilitas dalam menghadapi keputusan moral, sementara pendekatan klasik cenderung bersifat normatif dan kaku. Implikasi ini menciptakan ruang bagi pembahasan nilai-nilai yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keragaman konteks etis yang dihadapi oleh individu dan Masyarakat (Andayani, P.N. 2023). Dengan menyusun jembatan antara pemikiran filsafat klasik dan kontemporer dengan konteks pendidikan modern, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai filosofis dapat diartikan dan diterapkan dalam upaya nyata untuk mengatasi tantangan perundungan di sekolah. Dengan demikian, filsafat bukan hanya menjadi teori, tetapi panduan yang memberdayakan praktisi pendidikan dalam mencapai perubahan yang positif dan inklusif.

Dampak perundungan yang meluas dari korban langsung hingga iklim pendidikan secara keseluruhan memberikan gambaran tentang seriusnya isu ini dalam konteks pendidikan. Fokus pada konsep kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab sosial memungkinkan kita untuk melihat peran penting pendidikan dalam membentuk sikap dan perilaku, sehingga mencegah serta mengatasi perundungan. Pendidikan harus menjadi instrumen pembebasan, bukan alat penindasan. Melalui pendekatan pendidikan kritis, kita dapat membantu siswa memahami dan mengatasi perundungan (Paulo, F. 2008).

Selain itu, artikel ini tidak hanya memberikan analisis filosofis tetapi juga menawarkan saran-saran konkret tentang bagaimana sistem pendidikan dapat ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Dengan merangkum kerangka pemikiran filsafat pendidikan dan isu-isu sosial yang relevan, artikel ini berkontribusi pada diskusi luas tentang peran pendidikan dalam merespons dan mengatasi bentuk penindasan seperti perundungan. Kesimpulan artikel ini menekankan urgensi pemahaman filosofis terhadap isu-isu sosial kontemporer dan bagaimana filsafat pendidikan dapat menjadi pendorong perubahan yang positif dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode library research sebagai teknik pengumpulan data dengan mengkaji literatur terkait dengan masalah yang dipecahkan. Peneliti mendapatkan data yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Membaca buku dan hasil penelitian terkait dalam bentuk teks, hasil penelitian, laporan penelitian serta jurnal ilmiah (Sugiono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Filsafat Pendidikan

Menjelajahi peran filsafat pendidikan dalam menanggapi perundungan sebagai bentuk penindasan, artikel ini menghadirkan berbagai perspektif filsafat yang relevan, termasuk etika, keadilan, dan kekuasaan. Setiap perspektif ini memberikan kontribusi unik dalam membentuk pemahaman mendalam tentang perundungan di lingkungan pendidikan.

Etika: Etika Pendidikan bisa diartikan sebagai ilmu atau pelajaran etika, mengenai teori bagaimana seharusnya berperilaku atau berbuat dan tidak berbuat terhadap orang lain, khususnya dalam praktik pendidikan (Annur, Y.F., dkk. 2021). Perspektif etika dalam filsafat pendidikan dapat memberikan wawasan mendalam tentang karakter moral dan nilai-nilai yang terlibat dalam perundungan. Etika membuka ruang untuk mengeksplorasi pertanyaan tentang kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Melalui analisis etika, kita dapat mempertimbangkan apakah tindakan perundungan dapat dijustifikasi secara moral, dan bagaimana pendidikan dapat memainkan peran dalam membentuk sikap etis siswa. Sebagai contoh, pandangan deontologis dapat mengevaluasi tindakan perundungan berdasarkan pada aturan moral yang mutlak, sementara pandangan konsekuensial dapat mempertimbangkan dampak-dampak jangka panjang dari tindakan

tersebut. Dengan merunut kembali kepada konsep etika, artikel dapat menguraikan dasar moral untuk mengecam perundungan dan menggali nilai-nilai etika yang perlu ditanamkan dalam konteks pendidikan.

Keadilan: Pengetahuan tentang keadilan terdapat beberapa perumusan dalam memberikan definisi keadilan, namun tidak mudah untuk pemahaman makna keadilan yang diberikan oleh para pakar. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban (Helmi, M. 2015). Pandangan filsafat keadilan dapat membantu kita memahami perundungan sebagai suatu ketidaksetaraan atau pelanggaran terhadap hak-hak individu. Keadilan sosial dan distributif dapat diaplikasikan untuk menilai apakah korban perundungan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam konteks pendidikan. Dengan melibatkan konsep keadilan, artikel dapat menjelaskan bagaimana pendidikan harus berperan dalam menciptakan lingkungan yang adil, meratakan peluang, dan melibatkan tindakan korektif terhadap ketidakadilan.

Kekuasaan: Kekuasaan dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar dapat berperilaku dan berfikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mempengaruhi. Kekuasaan cenderung bersifat memaksa dan terkadang mengandung kekerasan (Pratama, R.A. 2021) Analisis kekuasaan dalam perspektif filsafat membantu mengungkap dinamika daya antara pelaku perundungan dan korban. Teori-teori kekuasaan, seperti teori kekuasaan Michel Foucault, dapat digunakan untuk menggali bagaimana kekuasaan di institutional pendidikan dapat mengekang atau memberdayakan individu. Dengan merinci konsep kekuasaan, artikel dapat membahas bagaimana struktur kekuasaan di dalam lingkungan pendidikan dapat memfasilitasi atau menghambat terjadinya perundungan.

Melalui integrasi perspektif etika, keadilan, dan kekuasaan, artikel dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena perundungan. Pemikiran filosofis ini tidak hanya memberikan dasar kritis untuk menilai dan menghadapi perundungan, tetapi juga membuka pintu untuk merancang solusi dan pendekatan pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan keadilan.

Relevansi Pemikiran Filsuf Klasik dan Kontemporer

Pemikiran filsuf klasik dan kontemporer yang memberikan kerangka kerja berharga dalam menghadapi tantangan perundungan dan merinci keterkaitan antara prinsip-prinsip moral dengan realitas kasus perundungan di dalam sekolah

Pemikiran Filsuf Klasik:

1. Aristoteles (384–322 SM):

Aristoteles membahas konsep etika *virtus* (kebajikan) dan etika *eudaimonia* (kebahagiaan sejati). Aristoteles menyatakan bahwa keutamaan adalah sifat utama yang muncul atas kebiasaan. Kebiasaan ini menjadi penting karena hal yang baik perlu dijalankan terus menerus. Seseorang tidak dapat dinilai memiliki keutamaan jika ia hanya menjalankan kebaikan secara jarang-jarang saja, atau bila yang bersangkutan mendapatkan keuntungan (Biatara, R. 2020). Dalam konteks perundungan, pendekatan ini dapat diterapkan dengan menekankan pentingnya pengembangan karakter moral dalam pendidikan. Aristoteles mendorong pendidikan yang bertujuan menciptakan lingkungan di mana kebajikan dan kebahagiaan sejati ditekankan, termasuk pembentukan karakter baik di kalangan siswa dan staf sekolah.

2. Immanuel Kant (1724–1804):

Menurut Kant, pendidikan diperlukan oleh manusia untuk menyempurnakan pribadi manusia yang berwatak luhur dan bertanggung jawab. Sifat manusia yang utuh dibangun melalui pendidikan bagi individu maupun kelompok. Peran pendidikan ialah menghasilkan individu yang mampu memberikan daya guna melalui keahlian dirinya, sehingga memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain (Sugiarti & Andalas, 2020). Konsep Kant tentang kewajiban moral dapat memberikan pedoman bagi tindakan individu dan institusi pendidikan dalam menentang perundungan sebagai bentuk pelanggaran hak moral. Pendekatan ini menyoroti pentingnya

tindakan moral yang bersifat kategoris dan tidak dapat dikecualikan, serta menentang segala bentuk perlakuan tidak adil.

Pemikiran Filsuf Kontemporer:

1. Martha Nussbaum:

Konsep kemampuan dasar manusia dalam pandangan Nussbaum dapat diaplikasikan untuk mengevaluasi dampak perundungan terhadap kesejahteraan siswa. Pendidikan seharusnya menggalakkan pengembangan kemampuan-kemampuan ini. Keterkaitan antara pemikiran Nussbaum dan perundungan melibatkan pemahaman tentang bagaimana perundungan dapat menghambat perkembangan kemampuan dasar manusia.

2. John Rawls:

Teori keadilan sosial John Rawls dapat memberikan panduan dalam merancang kebijakan dan tindakan yang adil untuk mengatasi perundungan. Menghubungkan prinsip-prinsip keadilan Rawls dengan realitas kasus perundungan dapat membimbing upaya untuk mencapai distribusi yang lebih adil dalam lingkungan sekolah.

3. Bell hooks:

Pemikiran hooks tentang keadilan, kekuasaan, dan pendidikan sebagai alat pembebasan dapat diaplikasikan untuk melawan perundungan dan mempromosikan inklusivitas di dalam sekolah. Keterkaitan antara pemikiran hooks dan perundungan terletak pada penghapusan hierarki yang melibatkan dominasi dan penindasan di antara peserta didik.

Menerapkan pemikiran-pemikiran ini dalam konteks pendidikan memungkinkan institusi untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dalam menanggapi dan mencegah perundungan. Dengan memahami keterkaitan antara prinsip-prinsip moral filsuf dan kasus-kasus perundungan di dalam sekolah, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan mendukung perkembangan holistik siswa.

Dampak Perundungan pada Iklim Pendidikan

Dampak perundungan yang tidak hanya memengaruhi korban langsung tetapi juga menciptakan iklim pendidikan yang merugikan secara keseluruhan memiliki implikasi yang mendalam terhadap konsep kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Mari kita eksplorasi dampak-dampak tersebut dan bagaimana konsep-konsep tersebut menjadi fokus utama dalam konteks perundungan di lingkungan pendidikan:

- **Kesejahteraan Psikologis:** Perundungan dapat merusak kesejahteraan psikologis korban, menciptakan tekanan emosional, kecemasan, dan depresi. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifatur Rizqi tahun 2020 dengan judul “DAMPAK PSIKOLOGIS BULLYING PADA REMAJA” memberikan hasil bahwa Perlakuan bullying yang diterima oleh korban bullying menyebabkan gangguan secara fisik maupun psikologis, korban bullying mengalami ketidakpercayaan diri dan gangguan dalam bersosialisasi (Rismayanti, M.A. 2022)
- **Keterpurukan Akademis:** Pelajar yang menjadi korban perundungan cenderung mengalami penurunan performa akademis karena stres dan distraksi yang disebabkan oleh perundungan. Iklim pendidikan yang terkontaminasi oleh perundungan dapat mengganggu proses pembelajaran, mengurangi konsentrasi, dan menurunkan motivasi belajar.
- **Cipta Suasana Tak Aman:** pembentukan lingkungan pendidikan yang tidak aman dan tidak menyenangkan bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang tidak langsung terlibat dalam perundungan. Fenomena ini seringkali mengakibatkan ketidaknyamanan, kecemasan, dan rasa tidak aman di kalangan siswa. Perundungan dapat menciptakan atmosfer di sekolah di mana peserta didik yang menjadi sasaran perundungan merasa takut dan tidak nyaman. Mereka mungkin mengalami tekanan psikologis, emosional, dan bahkan fisik, yang berdampak pada keberlangsungan proses belajar-mengajar. Namun, tidak hanya korban langsung yang merasakan dampaknya. Siswa lain yang tidak langsung terlibat juga bisa merasa tidak aman karena mereka mungkin khawatir menjadi target berikutnya atau tidak memiliki jaminan bahwa sekolah adalah tempat yang aman untuk mereka.

4. **Keterbatasan Kebebasan Individu:** Perundungan dapat membatasi kebebasan individu, terutama bagi korban yang mungkin merasa terkekang atau terancam dalam lingkungan pendidikan. Kebebasan dari ketakutan menjadi penting; perundungan dapat menciptakan iklim di mana siswa merasa tidak bebas untuk berpartisipasi dan mengekspresikan diri.
5. **Pelanggaran Hak Asasi:** Perundungan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan pendekatan keadilan harus diterapkan untuk menanggapi pelanggaran tersebut. Keadilan sosial menuntut perlakuan yang sama bagi semua individu di dalam konteks pendidikan, tanpa memandang latar belakang atau karakteristik pribadi.
6. **Tanggung Jawab Kolektif:** Pendidikan memiliki tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan bagi semua siswa. Tanggung jawab sosial pendidikan mencakup peran aktif dalam membentuk sikap positif dan memberdayakan siswa untuk mengatasi dan mencegah perundungan.
7. **Pentingnya Pencegahan:** Fokus pada keadilan dan tanggung jawab sosial juga mencakup upaya pencegahan perundungan melalui pendidikan, pemahaman, dan dukungan. Pencegahan perundungan bukan hanya tentang menanggapi kasus-kasus perundungan yang telah terjadi, tetapi lebih pada menciptakan budaya yang mencegah terjadinya perundungan secara keseluruhan. Dengan fokus pada keadilan dan tanggung jawab sosial, sekolah dapat menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan, belajar, dan perkembangan positif bagi semua anggotanya.

Melalui penerapan konsep kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, pendidikan dapat berperan sebagai agen perubahan yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi semua peserta didik. Dengan merangkul nilai-nilai ini, iklim pendidikan dapat dipulihkan menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan holistik dan memberikan landasan kuat bagi kebebasan individual, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Saran-saran Konkret untuk Perbaikan Sistem Pendidikan

Berikut adalah beberapa saran konkret yang dapat diterapkan dalam meningkatkan sistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif, dengan merujuk pada konsep-konsep filsafat:

1. **Implementasi Pendidikan Etika:** Mengintegrasikan program pendidikan etika yang mencakup prinsip-prinsip moral dari pemikiran filsuf seperti Kant, Mill, dan Nussbaum. Ini dapat membantu siswa memahami nilai-nilai etika, mempromosikan empati, dan membangun sikap menghormati terhadap keberagaman.
2. **Pendidikan untuk Keadilan Sosial:** Menyelaraskan kurikulum dengan teori keadilan sosial, seperti yang diusung oleh John Rawls atau Amartya Sen, untuk memperkuat pemahaman siswa tentang keadilan dan mendorong partisipasi aktif dalam memecahkan masalah sosial, termasuk perundungan.
3. **Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik:** Memberikan pelatihan khusus kepada guru dan staf sekolah mengenai konsep filsafat dan implementasinya dalam mendukung lingkungan inklusif. Ini dapat mencakup strategi untuk mengenali, mencegah, dan menanggapi perundungan.
4. **Membangun Komunitas Belajar yang Aman:** Membuat atmosfer belajar yang mendukung dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan holistik dari filsuf-filsuf kontemporer, seperti Martha Nussbaum. Fokus pada perkembangan seluruh individu untuk memastikan keamanan dan inklusivitas.
5. **Partisipasi Siswa dalam Pembuatan Keputusan:** Mendorong partisipasi aktif siswa dalam membuat keputusan dan menyelenggarakan kegiatan sekolah. Hal ini sesuai dengan pemikiran filosofis John Dewey yang menekankan demokrasi dalam pendidikan.
6. **Program Anti-Bullying:** Mendesain program anti-perundungan berdasarkan prinsip-prinsip filsafat yang mengecam tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip etika dan keadilan.
7. **Pengembangan Keterampilan Sosial dan Empati:** Memasukkan dalam kurikulum pengembangan keterampilan sosial dan empati berdasarkan pemikiran filsuf yang menekankan

- pentingnya hubungan sosial dan moralitas, seperti Emmanuel Levinas.
8. **Fasilitasi Dialog Filosofis:** Mendorong dialog filosofis di antara siswa untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka sendiri serta orang lain. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana perbedaan dihargai dan dihormati.
 9. **Keberlanjutan dan Evaluasi:** Membangun mekanisme evaluasi yang berkelanjutan untuk melihat efektivitas implementasi konsep filsafat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan keterlibatan yang berkelanjutan.
 10. **Mengintegrasikan Konsep Tanggung Jawab Kolektif:** Menerapkan konsep tanggung jawab kolektif dalam kebijakan sekolah, melibatkan seluruh komunitas pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan.

Penerapan saran-saran ini haruslah sesuai dengan konteks masing-masing lembaga pendidikan, dan keterlibatan seluruh komunitas pendidikan menjadi kunci keberhasilannya.

KESIMPULAN

Filsafat pendidikan memiliki peran penting dalam merespons perundungan sebagai bentuk penindasan karena menyediakan kerangka kerja teoritis yang mendalam untuk memahami, mengevaluasi, dan mengatasi fenomena tersebut. Melalui eksplorasi perspektif filsafat seperti etika, keadilan, dan kekuasaan, artikel mampu memberikan wawasan yang mendalam terhadap aspek-aspek kunci yang terlibat dalam perundungan di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, P.N. 2023. Metaetika Analisis Terhadap Sifat dan Asal-Usul Nilai-Nilai Moral dalam Filsafat. *Jurnal Filsafat*. Vol 4 (1).
- Annur, Y.F., Ririn, Y., Shofia, T.A. 2021. Pendidikan Karakter Dan Etika Dalam Pendidikan. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
- Biatara, R. 2020. Virtue Ethics Aristoteles dalam Kebijaksanaan Praktis dan Politis Bagi Kepemimpinan Islam. *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*. Vol 11 (2).
- Durkheim, E, 1973, *Moral Education A Study in the Theory and Application of The Sociology of Education*, alih bahasa: Everest K Wilson and Herman Schnurer The Free Press of Glencoe, New York.
- Helmi, M. 2015. Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol 14 (2).
- Paulo, F. 2008. *Pedagogy Of The Oppressed*. Diterjemahkan oleh F. Danuwita dalam: *Pendidikan Kaum Tertindas*". Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Pratama, R.A. 2021. Kekuasaan, Pengetahuan, Dan Hegemoni Bahasa Dalam Perspektif Michele Foucault Dan Francis Bacon. *Jurnal Filsafat Indonesia*. Vol 4 (1).
- Rismayanti, M.A. 2022. Pengaruh Tindakan Bullying Terhadap Perkembangan Mental Anak Kelas V Sekolah Dasar Negeri Pamulang Indah. *Skripsi Pendidikan*.
- Sinulingga, S.P. 2016. Teori Pendidikan Moral Menurut Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Moral Anak Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*. Vol 26 (2).
- Sugiarti, S., & Andalas, E. F. 2020. *Membangun Optimisme Meretas Kehidupan Baru dalam Dunia Pendidikan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Zakiyah, E.Z., Sahadi, H., & Meilanny, B.S. 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol 4 (2).